



DIY Waspadai Pemudik

JOGJA-Pemda DIY mewaspada kedatangan pemudik seiring diberlakukannya kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta pada Senin (14/9).

Lugas Subarkah, Hafit Yudi Suprobo
& Lajeng Padmaratri
redaksi@harianjogja.com

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menuturkan diterapkannya kembali PSBB di Jakarta akan berdampak juga ke daerah lain, termasuk DIY. "Kami

Sultan tidak memperlakukan jika masing-masing dusun menutup wilayahnya jika tujuannya untuk memudahkan tracing.

Saat ini Kementerian Kesehatan tidak lagi mengharuskan rapid test bagi setiap pengguna transportasi umum.

khawatir sebelum itu [dilaksanakannya PSBB] mungkin orang Jogja [yang ada di Jakarta] kembali seperti kemarin [penerapan PSBB di awal pandemi]. Itu yang harus diwaspadai," kata Sultan, Kamis (10/9).

Untuk itu Sultan telah meminta Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam, selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19, segera menggelar rapat untuk mengantisipasi penerapan

PSBB di Jakarta. "Makanya saya berharap lurah-lurah bisa mewaspada seperti yang mereka lakukan kemarin [awal pandemi]," katanya.

Menurutnya yang terpenting sekarang adalah bagaimana setiap pendatang bisa terdata sehingga memudahkan upaya tracing. Ia juga tidak masalah jika masing-masing dusun menutup wilayahnya sendiri jika tujuannya untuk memudahkan



tracing. "Masuk desa, datanya masuk," ungkapnya.

Sekretaris Daerah DIY, Kadarmantha Baskara Aji, menjelaskan berdasarkan pengalaman sebelumnya, saat PSBB di Jakarta, banyak perantau yang tidak bisa melakukan aktivitas di kota tersebut sehingga memilih pulang kampung.

"Daripada di Jakarta nganggur pulang ke daerah, ini menjadi masalah di daerah karena banyak pemudik yang kesehatannya perlu dipertanyakan. Kami akan koordinasi dengan kabupaten dan kota, penegakan protokol Pergub No. 77/2020 harus diperketat," katanya.

Meski demikian Pemda DIY tidak akan mendirikan *check point* di perbatasan lagi karena dengan jumlah mobilitas kendaraan yang sudah sebanyak sekarang hal tersebut sulit dilakukan. Adapun yang perlu diwaspadai soal kedatangan ini yakni pada terminal, stasiun dan bandara.

Saat ini Kementerian Kesehatan tidak lagi mengharuskan *rapid test* bagi setiap pengguna transportasi umum. Kendati demikian Pemda DIY akan mempelajari lagi aturan tersebut. Jika tidak melanggar, DIY akan tetap memberlakukan wajib *rapid test* bagi pendatang.

Lanjut

tanggapi
ketahui

► Halaman 11

1.
2.
3.
4.

☐ Netral

☐ Biasa

☐ Jumpa Pers

DIY Waspada...

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan warga yang mudik kembali ke Jogja diharapkan untuk menerapkan isolasi mandiri secara sungguh-sungguh. Heroe mengaku dengan diterapkannya PSBB di DKI Jakarta, mau tidak mau Pemkot harus menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19 seperti saat awal-awal pandemi Covid-19 pada Maret lalu. Mengingat, terjadi penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Jogja dan di kota-kota besar.

"Protokol pencegahan penularan Covid-19 yang lama harus diterapkan. Warga yang kembali sebelum PSBB diharapkan melaksanakan isolasi mandiri secara sungguh-sungguh. Entah itu warga yang kembali untuk urusan kerja maupun mereka yang ada di Jogja," ujar Heroe. Ia menambahkan kasus Covid-19 yang berasal dari orang tanpa gejala (OTG) sedang menjadi perhatian Pemkot Jogja. Berbeda dengan penanganan kasus Covid-19 saat awal-awal pandemi Covid-19 yang berasal dari pasien bergejala. "Karena sebaran kasus Covid-19 saat ini banyak yang berasal dari OTG. Kalau di awal-awal kan yang banyak kami antisipasi itu kan pasien bergejala. Lha ini yang datang banyak yang tidak bergejala," ungkap Heroe yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja.

Ibu Hamil

Heroe Poerwadi menambahkan ada enam ibu hamil terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Jogja. Menurut Heroe, terkonfirmasi ibu hamil positif Covid karena setiap ibu hamil yang kandungan berusia 38 pekan menjalani *screening* kesehatan, guna memastikan kesehatan sebelum menjalani proses kelahiran. "Yang sudah masuk pekan 39/39 umur kehamilan, artinya mungkin 10 hari sebelumnya sudah mulai *gubuk*, tergantung dari prediksi dokter kapan lahirnya," ujar Heroe.

Lebih lanjut Heroe menerangkan dari 12 ibu hamil yang menjalani *screening* kesehatan, lima di antaranya positif Covid-19. Sementara satu ibu lainnya diketahui positif saat melakukan *screening* mandiri. "Karena ibu hamil mengalami perubahan hormon dan fungsi sistem kekebalan tubuh," jelasnya.

Heroe juga menambahkan sewaktu hamil sistem imun ibu hamil perlu bekerja lebih keras karena melindungi dua tubuh

(ibu dan janin). "Sekarang ibu hamil lebih berisiko teresang infeksi (virus)," ujarnya.

Hingga saat ini belum diketahui keasam ibu hamil apakah tinggal dalam lingkup domisili yang sama atau memeriksakan diri di fasilitas kesehatan yang sama. Heroe tengah melakukan *tracing* pada kasus ini.

Hingga Kamis, kemarin penambahan pasien positif Covid-19 di DIY masih tinggi. Berdasarkan data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY ada 50 penambahan kasus positif pada Kamis. Domisili Sleman dan Bantul mendominasi penambahan ini masing-masing sebanyak 16 dan 19 kasus. Sementara 30 kasus dinyatakan sembuh dan satu kasus dilaporkan meninggal.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, mengatakan penambahan kasus berdasarkan domisilinya meliputi Sleman 19 kasus, Kota Jogja 13 kasus, Bantul 16 kasus, Kulonprogo, dan Gunungkidul satu kasus.

Adapun berdasarkan riwayatnya, penambahan kasus meliputi hasil *screening* karyawan kesehatan lima kasus, hasil *screening* pasien pra operasi satu kasus, hasil *tracing* kasus positif 17 kasus, pelaku perjalanan luar daerah tujuh kasus dan masih dalam penelusuran 20 kasus.

Penambahan ini berdasarkan pemeriksaan pada 551 sampel dari 487 orang. Satu kasus dilaporkan meninggal yakni Kasus 1.597, laki-laki, 60, domisili Kota Jogja. Sementara kasus sembuh berdasarkan domisilinya meliputi Bantul 26 kasus, Sleman dua kasus, Kulonprogo dan Gunungkidul masing-masing satu kasus.

Dengan penambahan ini maka total kasus positif di DIY menjadi sebanyak 1.695 kasus, dengan 1.298 kasus sembuh dan 49 kasus meninggal. Kendati penambahan kasus cukup banyak, kapasitas *bed* rumah sakit rujukan Covid-19 saat ini masih mencukupi, dengan rincian kritikal sisa 26 *bed* dan nonkritikal sisa 125 *bed*.

Protokol Kesehatan

Sementara itu, pada hari pertama dilaksanakannya pendisiplinan penerapan protokol kesehatan pada Kamis, Satpol PP Sleman menyasar sejumlah kantor pelayanan masyarakat dan ruang publik. Dari operasi ini, masih dijumpai sejumlah orang yang melanggar protokol kesehatan lantaran tidak mengenakan

masker. "Di perkantoran tersebut tidak ditemukan pelanggaran. Sedangkan di Lapangan Dunggung ditemukan tiga pelanggar yang tidak memakai masker," ungkap Plt Kepala Satpol PP Sleman, Arip Pramana.

Kepada pelanggar protokol kesehatan itu diterapkan pemberian sanksi sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 37.1/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam perbup itu mengatur pemberian sanksi antara lain kerja sosial, pembinaan bela negara, hingga denda sebesar Rp100.000. Penjatihan sanksi ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat operasi.

"Sanksi yang kami terapkan saat pendisiplinan tadi yaitu sanksi sosial kepada satu orang yaitu menyapu jalan, lalu dua orang lainnya melafalkan Pancasila dan menyanyikan lagu *Indonesia Raya*," katanya.

Di Bantul, Satpol PP belum memberikan tindakan tegas kepada pelanggar protokol kesehatan. Kepala Satpol PP Bantul Yulius Suharta mengatakan hingga saat ini belum ada penerapan sanksi denda Rp100.00 kepada warga yang melanggar. Sanksi hanya akan diberikan kepada orang yang telah dua kali melanggar aturan di peraturan tersebut. "Setelah dia terdenda dua kali melanggar, baru akan kami kenakan sanksi denda. Sebab, ketuarnya Perbup bukan kepada sanksi tapi membangun kesadaran," kata Yulius.

Yulius mengungkapkan sejak perbup ditandatangani 20 Juli lalu, sosialisasi dan operasi patuh telah dilakukan oleh jawatannya. Operasi pertama telah dilakukan pada 3 Agustus lalu dan operasi kedua digelar di depan Balai Desa Palbapang, 9 September lalu. Dari operasi tersebut, kami memang memberikan hukuman edukasi dan bela negara. Ada yang kami minta ucapkan Pancasila dan menyanyikan lagu *Indonesia Raya*. Beberapa juga kami minta untuk membersihkan tempat lavan publik," kata Yulius. Kapolres Bantul AKBP Wachyu Tri Bala S. mengatakan kewenangan penegakan pelanggar perbup ada sepenuhnya ada di Satpol PP. Meski demikian, polisi siap bekerja sama dengan Satpol PP dalam upaya menekan pelanggaran Perbup tersebut. "Kami siap membantu untuk penegakannya," katanya. (Catut Pual / Lanut & Jurnalis)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005